

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN COVID-19 SEBAGAI BENTUK MANUVER  
ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI**

**I DEWA DALEM SIWA REDITIYA\*<sup>1</sup>**

**I NYOMAN SUBANDA<sup>2</sup>**

**GEDE SRI DARMA<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pendidikan Nasional

\*Email: dewadalem.sr@gmail.com

**ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic has overhauled all structures of life, be it in the economic, social and cultural aspects. The Covid-19 virus is the government's main focus in preventing and tackling it so it doesn't spread and takes many victims. This study aims to analyze the implementation of policies from both the central and regional governments carried out by the Bali Provincial Health Office. This research is a qualitative research with data collection techniques, namely observation, documentation and interviews with 7 informants from the government, community and policy observers taken using purposive sampling technique and data analyzed by triangulation. The results of this study stated that overall the dimensions of good policy implementation according to Edward III, namely Communication, Resources and Bureaucratic Structure had been carried out well by the Bali Provincial Health Office in carrying out or carrying out regulations or rules regarding handling and preventing the Covid-19 pandemic. From other dimensions, according to Van meter Van horn, namely Standards and Policy Targets as well as Compliance and Executors' Responsiveness, it is considered sufficiently precise and accurate.*

**Keywords:** *Organizational Maneuvers, Policy Implementation, Covid-19, Bali Provincial Health Office*

## I. PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 masyarakat dihebohkan dengan adanya virus yang membahayakan yang selanjutnya di kenal dengan Covid-19 atau virus corona. Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian (Xiao et al., 2020). SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui (Syafriada & Hartati, 2020).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan pandemi ini dengan mengeluarkan kebijakan sebagai langkah awal yang responsif untuk meminimalisir lebih luasnya penyebaran virus Covid-19. Selain kebijakan kesehatan dan keselamatan

masyarakat, kebijakan penanggulangan Covid-19 juga menyangkut kebijakan penyelamatan ekonomi dan kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah. Kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan diantaranya: *Pertama*, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh Menteri, Gubernur dan Walikota untuk meminimalkan rencana belanja yang bukan merupakan belanja prioritas pada APBN dan APBD. *Kedua*, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerja sama dalam melakukan relokasi anggaran yang berfokus pada penanggulangan corona khususnya pada sektor ekonomi dan kesehatan. *Ketiga*, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tetap menjamin daya beli masyarakat khususnya masyarakat bawah serta tetap menjamin ketersediaan. *Keempat*, meningkatkan program padat karya. *Kelima*, Pemerintah memberikan bantuan dana kepada para pemegang kartu sembako sebanyak Rp 200.000,- setiap bulan dan untuk setiap keluarga. *Keenam*, Pemerintah

memberikan alokasi anggaran prakerja sebesar Rp 10 Triliun dan melakukan percepatan dalam pelaksanaan kartu prakerja. *Ketujuh*, Pemerintah membantu dalam pembayaran PPh Pasal 21 bagi karyawan yang bekerja pada sektor industri pengolahan. *Kedelapan*, pemberian penurunan bunga dan penundaan cicilan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selama satu tahun untuk sektor perbankan dan industri non bank. *Kesembilan*, pemberian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) bersubsidi untuk masyarakat dengan penghasilan yang rendah (Krisiandi, 2020).

Provinsi Bali juga telah berupaya menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya penanganan laju penyebaran Covid-19. Beberapa kebijakan sebagai tindak lanjut kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat diantaranya: (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Provinsi Bali, (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun

2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Provinsi Bali, dan (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Peraturan-peraturan Gubernur tersebut dilakukan untuk memperkuat penanganan kesehatan, menangani dampak sosial dan ekonomi akibat penyebaran Covid-19. Kebijakan-kebijakan ini mengatur perubahan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan belajar, bekerja dan beribadah dari rumah. Kebijakan inipun berkaitan dengan *social distancing* dan *physical distancing* sebagai salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 dengan menjaga jarak antara satu orang dengan yang lain.

Kebijakan adalah suatu mekanisme penyelesaian permasalahan sosial untuk

kepentingan masyarakat yang berdasarkan pada kesejahteraan dan keadilan. Beberapa hal penting dalam penyusunan suatu kebijakan yaitu (1) meningkatnya taraf kehidupan masyarakat; (2) adanya keadilan: *By the law, social justice* dan peluang prestasi dan kreasi individual; (3) masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi; dan (4) kepastian terkait pengembangan berkelanjutan. Kebijakan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif.

Kebijakan substantif merupakan suatu keputusan dalam pemilihan alternatif yang dianggap terbaik dalam mengatasi permasalahan. Kebijakan implementatif merupakan tindak lanjut dari kebijakan substantif yang merupakan suatu upaya dalam melaksanakan kebijakan substantif (Darwin, 2014).

Memperhatikan kebijakan-kebijakan Provinsi Bali tersebut di atas maka menjadi menarik untuk mengkaji manuver organisasi dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bali sebagai

akibat yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19 maka menjadi suatu keharusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan masyarakat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dengan memahami kondisi sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, dinyatakan setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Bali akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi daerahnya, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan.

Menurut (Sundaram et al., 2021) menyimpulkan implementasi yang cepat difasilitasi oleh komitmen staf dan komunikasi antar pemangku kepentingan dapat mengurangi penyebaran Covid-19, namun terhambat oleh keterbatasan dengan bimbingan yang diterima, lingkungan fisik, sumber daya, kepatuhan orang tua dan

menyeimbangkan tindakan pencegahan dengan pembelajaran.

Sementara itu penelitian Maqbool & Khan, (2020) mengemukakan keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan masyarakat dan sosial dalam pencegahan virus Covid-19 tergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai yang meliputi peralatan medis, personel dan sumber daya keuangan.

Jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini (Ristyawati, 2020). Sementara itu penelitian Wahidah et al., (2020) mengemukakan peran pemerintah tak henti-hentinya mengingatkan dan meminta peran serta masyarakat untuk pencapaian hasil kebijakan pemerintah yang maksimal.

Koontz & Weihrich, (2010) menyatakan bahwa kebijakan

merupakan suatu cara pemerintah dalam mengarahkan pengelolaan kegiatan. Dalam hal ini kebijakan berkaitan dengan ide dalam pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang diterapkan pemerintah atau lembaga untuk mencaai tujuan yang telah disusun.

Pemerintahan sebagai satu unit organisasi dari kelompok orang yang memiliki kekuasaan, dimana melalui kekuasaan tadi manusia dapat diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintahan sebagai seunit perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada. Dalam kaitannya dengan organisasi, pemerintah dipahami sebagai bagian dari tiga cabang kekuasaan organisasi sebagaimana yang dikembangkan lewat Trias Politica oleh Montesquie yaitu legislatif, yudikatif dan eksekutif yang bertugas sebagai organisasi pembuat kebijakan, pelaksana dan pengawasan kebijakan.

Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen terlihat apabila bergerak tidaknya organisasi kearah pencapaian tujuan

sangat tergantung atas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam menggerakkan organisasi kearah yang telah ditentukan, sehingga tujuan bersama yang ingin dicapai dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, kebijakan adalah suatu petunjuk dan batasan yang dijadikan suatu pedoman dan batasan secara umum dalam melakukan suatu tindakan dan aturan yang harus dilaksanakan oleh pelaku dan pelaksana kebijakan karena merupakan hal yang penting dalam pengelolaan organisasi serta dalam proses pengambilan keputusan dari

perencanaan yang disusun dan disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan menjadi hal yang penting dalam pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena rumit yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam memberikan perubahan atau manuver organisasi dengan melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan dan aturan yang dibuat baik itu Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19 di Provinsi Bali.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno & Admojo, 2014).

Perlu ditegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya tercapainya tujuan. Hal ini dipertegas oleh Agustino, (2016) dengan mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah

sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Implementasi kebijakan menurut Nugroho, (2020) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

## **2.2 Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19**

Sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, penyebaran Covid-19 terjadi dengan cepat di Indonesia. Untuk itu diperlukan pengembangan strategi respon berdasarkan komunikasi yang terjadi di tingkat nasional dan provinsi, dengan tujuan (1) Mengurangi dan menghentikan laju penularan, serta menunda

penyebaran infeksi; (2) Memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada pasien, khususnya kasus kritis; dan (3) Meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, dan kegiatan lain di sektor tersebut.

Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mengidentifikasi kasus baru, mengelola kasus baru dan memberikan intervensi untuk kasus baru Covid-19, serta berupaya mencegah penyebaran kasus baru untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru dengan menerapkan prosedur kebersihan yang ketat di setiap kegiatan masyarakat. Setiap daerah juga harus mempersiapkan dan merespons berbagai situasi kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Strategi komprehensif harus disiapkan dalam dokumen rencana operasional Covid-19 yang melibatkan kegiatan antar departemen. Rencana operasional meliputi (1) koordinasi, perencanaan dan pemantauan; (2) komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat

(3) pemantauan, tim aksi cepat (TGC), analisis risiko, investigasi epidemiologi; (4) pendapatan nasional/daerah, perjalanan dan transportasi internasional (5) laboratorium; (6) pengendalian infeksi; (7) manajemen kasus; (8) dukungan operasional dan logistik; (9) kesinambungan pelayanan dan sistem dasar, dengan mempertimbangkan kondisi transmisi atau kapasitas yang terbatas di masyarakat serta kondisi dan persyaratan bantuan kemanusiaan (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Pandemi merupakan bencana yang tidak wajar, sehingga rencana penanggulangan Covid-19 dapat menggunakan kerangka tanggap bencana nasional berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko pandemi. Dokumen renovasi harus ditinjau dan diperbarui setidaknya setiap dua minggu. Konsep aksi tanggap Covid-19 berdasarkan Kerangka Kerja Bencana Nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Menurut pedoman *World Health Organization* WHO, (2020) terdapat

4 (empat) skenario penularan pandemi Covid-19 yaitu (1) Wilayah tanpa kasus (*no cases*); (2) Wilayah dengan satu atau lebih kasus, baik impor maupun lokal, bersifat sporadik dan belum terbentuk kelompok (*sporadic cases*); (3) Wilayah dengan kelompok kasus dalam hal waktu, lokasi dan paparan umum (*clusters of cases*); dan (4) Wilayah dengan penularan komunitas (*community transmission*).

Setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mampu memetakan lokasi transmisi di wilayahnya. Satu wilayah mungkin memiliki beberapa skenario transmisi di wilayah yang lebih kecil, misalnya, beberapa Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau beberapa sub-wilayah di satu Kabupaten/Kota. Poin utama dalam skenario penanggulangan adalah menemukan sebanyak mungkin kasus di kluster dan merespons dengan sukses (minimal 80%). Setelah merespons, jumlah kasus berkurang setidaknya 50% (Kementerian Kesehatan RI, 2020).



### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengamati fenomena pandemi Covid-19 baik itu dari segi aspek respon pemerintah dan tanggapan masyarakat serta proses implementasi kebijakan yang dijalani oleh Satgas Covid-19. Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan pertimbangan adalah Bali yang merupakan pintu salah satu pintu gerbang kepada dunia internasional perlu dikaji lebih dalam tentang aktivitas dalam penanganan pandemi Covid-19. Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yang

dibagi menjadi beberapa kelompok diantaranya empat orang dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dua orang masyarakat dan seorang pengamat kebijakan. Informan diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi serta pengumpulan data secara *online* (Moleong, 2018). Teknik analisis data dengan Triangulasi Teknik dan Sumber (Sugiyono, 2018) serta penarikan kesimpulan berdasarkan (Miles & Huberman, 1994).

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai hasil triangulasi dalam proses analisis data dengan mewawancarai seluruh informan, observasi di lapangan dan studi dokumentasi maka penelitian ini menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan Covid-19, Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah melakukan beberapa manuver atau terobosan yang mengacu kepada

regulasi-regulasi yang ada baik itu yang berasal dari pusat ataupun yang ada di daerah. Bentuk manuver tersebut adalah hasil dari respon cepat Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam menekan penyebaran virus Covid-19 dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien penderita penyakit Covid-19. Berdasarkan teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III, dalam

penelitian ini memiliki hasil yang mendukung beberapa dimensi diantaranya adalah:

#### **4.1 Komunikasi**

Pada hasil penelitian ini menyatakan bahwa dimensi komunikasi sangat berperan penting dalam melaksanakan implementasi kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Beberapa manuver yang telah dilakukan diantaranya adalah dengan memfokuskan kepada komunikasi risiko, yaitu risiko apa saja yang harus dipahami dan akan dihadapi dalam memberikan pelayanan untuk menangani pandemi Covid-19. Pemberian informasi yang tepat dan dengan media yang baik akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang betapa bahayanya virus Covid-19 yang sedang melanda. Pihak Dinas kesehatan Provinsi Bali tidak sendirian mengkampanyekan protokol kesehatan yang wajib diikuti dan ditaati oleh masyarakat tetapi

juga dengan berkerja sama dengan instansi terkait dalam hal ini adalah seluruh lembaga yang ditunjuk menjadi satgas Covid-19. Salah satu komunikasi penyampaian informasi tentang pencegahan virus Covid-19 disampaikan juga oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, selain itu lembaga pemerintahan lainnya seperti di Kecamatan, Desa hingga ke tingkat banjar-banjar dimaksimalkan agar dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat serta pemahaman mengenai virus Covid-19 kepada masyarakat.

Selain itu komunikasi dengan memberikan informasi yang tepat dapat mengklarifikasi atau menganulir berita-berita yang tidak benar dan provokatif serta hoax-hoax yang ada. Hal ini dilakukan agar tidak timbul kepanikan atau kesalahan dalam menangani pasien Covid-19 itu sendiri. Pemberian informasi dan edukasi melalui berbagai media sosial juga membantu mempercepat penyampaian informasi ke masyarakat.

Dengan demikian, kerjasama antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dapat terjalin dengan baik dan saling membantu dalam mencegah dan mengobati pasien penderita Covid-19. Menurut beberapa informan bahkan menyatakan bahwa pola komunikasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Bali baik itu secara offline dan online sudah cukup baik dan tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

#### 4.2 Sumber Daya

Dimensi lainnya dalam teori implementasi kebijakan menurut Edward III adalah Sumber Daya. Dalam hasil penelitian ini membahas mengenai bagaimana Dinas Kesehatan Provinsi Bali melakukan manuver dalam hal sumber daya dari segi ekonomi, manusia dan material untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Penelitian ini mendukung teori dari Edward III

pada dimensi Sumber Daya. Dalam kaitannya sumber daya manusia adalah terobosan baru yang dilakukan adalah dengan membentuk satgas Covid-19 yang diketuai oleh Gubernur, lalu membentuk tim-tim lainnya yang didalamnya adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Merekrut dan membentuk tim kerja seperti Tim Gerak Cepat, Tim Tracing, Tim Sampling dan Tim lainnya yang terkait. Selain itu kerja sama dengan tenaga ahli lainnya sangat membantu dalam menjalankan implemementasi ini seperti dengan bantuan kerja sama dengan universitas, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam kaitannya sumber daya dari segi ekonomi hal yang terpenting dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali adalah dengan *recofusing* atau mengalokasikan dana bantuan dari Pemda dengan menggunakan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) agar mendukung pelaksanaan kebijakan sehingga dapat maksimal dilakukan.

Selain itu juga dana diberikan melalui APBN, APBD dan Hibah untuk mendukung proses implementasi kebijakan agar dapat dilakukan secara maksimal. Tetapi dalam penelitian ini juga menemukan bahwa dana yang digunakan untuk Pemda tidak bisa secara maksimal mencakup keseluruhan kegiatan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian diperlukan bantuan stakeholder lainnya dalam mendukung kegiatan tersebut secara bersama-sama. Beberapa informan mengatakan bahwa pihak komunitas, organisasi masyarakat, pengusaha atau lembaga di desa dan banjar juga ikut membantu secara swadaya untuk support baik itu tenaga maupun dana untuk mendukung kebijakan pemerintah. Jadi tidak perlu menunggu bantuan pemerintah tetapi secara mandiri ikut menjalankan kebijakan tersebut.

Sumber daya lainnya berupa materi, logistik, sarana dan prasarana juga merupakan faktor

vital dalam mendukung proses pelaksanaan implementasi penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Manuver yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Bali adalah dengan cepat tanggap menyediakan sarana dan prasarana yang pada awal mulanya masih banyak kekurangan seperti kebutuhan akan lokasi karantina, logistik seperti APD, alat tes PCR atau Antigen serta alat-alat kesehatan lainnya terutama pada tempat yang di suspek menjadi pintu terjadinya penyebaran virus Covid-19 ini. Sedangkan untuk daerah lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah berkoordinasi kepada instansi dan lembaga terkait untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan logistik yang diakibatkan kepanikan masyarakat.

#### **4.3 Struktur Birokrasi**

Dalam rantai komando satu kesatuan, adanya struktur dan tupoksi yang jelas merupakan kunci dalam melakukan koordinasi yang

baik. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid-19 yang dalam hal ini kaitannya adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah memiliki struktur birokrasi yang baik dan jelas serta mengacu pada regulasi-regulasi yang dikeluarkan baik itu dari pusat dan disinergikan dengan regulasi daerah serta disesuaikan pada lokasi pandemi, karena tidak semua lokasi pandemi bisa menjalankan suatu regulasi secara konkret, perlu adanya perubahan-perubahan dalam beradaptasi.

Secara struktur birokrasi, dari elemen Pemerintah Pusat dan Daerah sudah memiliki regulasi yang mengatur dengan dibentuknya Satgas Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19, dimana di daerah provinsi ketua satgas ini adalah Gubernur. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, maka di daerah juga wajib membuat tim satgas Covid-19 tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan

Kelurahan serta Desa Adat. Selain itu lembaga dan instansi terkait lainnya seperti Universitas, Komunitas Kesehatan dan Organisasi Sosial juga bahu-membahu dalam menangani Covid-19 ini. Dari perspektif Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dalam kaitannya pada dimensi struktur birokrasi telah melaksanakan kegiatan sesuai intruksi Pemerintah Pusat dan Daerah, adapun yang dilakukan adalah dengan membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) dan tim lainnya yang dibentuk dalam menyesuaikan keadaan situasi di lapangan seperti tim tracer, tim surveilans, tim pengambilan sampel, tim vaksin dan tim logistik. Hal ini dilakukan agar bisa melakukan respon cepat terhadap penanganan pasien Covid-19 dan menekan angka penyebaran Covid-19.

Sedangkan dalam teori implementasi kebijakan menurut (Van Meter & Van Horn, 1975) dalam penelitian ini menemukan

beberapa dimensi yang mendukung diantaranya:

#### **4.4 Standar dan Sasaran Kebijakan**

Dimensi lainnya yang harus diperhatikan dalam teorinya Van Meter Van Horn adalah bagaimana standar dan sasaran kebijakan. Hal ini sangat penting dikarenakan standar dan sasaran kebijakan menjadi tolak ukur dan pedoman dalam melakukan proses implementasi suatu kebijakan. Dalam kaitannya dengan hasil penelitian ini, segala standar kebijakan wajib mengikuti regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, baik itu dari Presiden maupun turunanannya pada kementerian dan lembaga terkait yang diteruskan ke daerah masing-masing yang terdampak pandemi Covid-19. Sasaran kebijakan ini berfokus kepada penekanan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19 dan penanganan kepada masyarakat yang terpapar virus tersebut, serta upaya dalam untuk membentuk imunitas masyarakat

agar bisa bertahan dari penyakit Covid-19 ini.

Penelitian ini membuktikan bahwa Dinas Kesehatan provinsi Bali telah melakukan upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan virus Covid-19 dengan standar dan sasaran kebijakan yang tepat. Standar yang dilakukan mengacu kepada Kementerian Kesehatan dengan menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan serta Petunjuk Teknis (Juknis) yang menjadi acuan dalam melakukan implementasi kebijakan tersebut. Sasaran kebijakan juga dimotori oleh Bapak Gubernur Bali, dengan mengeluarkan Pergub dengan lampiran-lampiran Juknis agar standar penanganan Covid-19 jelas dalam regulasi. Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga meningkatkan kegiatan pencegahan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berisiko tinggi terpapar virus, serta mensterilkan daerah atau lokasi-lokasi yang vital di Bali

seperti objek pariwisata, tempat event meeting besar dan beberapa lokasi penting lainnya.

#### **4.5 Kepatuhan serta Daya Tanggap Pelaksana**

Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana menjadi dimensi implementasi kebijakan terakhir dalam penelitian ini. Berdasarkan teori dan dimensi ini, maka dapat dinyatakan bahwa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya Bali prosesnya begitu cepat, hal ini dikarenakan Bali memiliki gerbang internasional untuk turis asing yang berkunjung ke Bali. Virus Covid-19 memiliki kecepatan penyebaran yang sangat cepat, sedangkan di satu sisi, daerah yang menjadi objek penyebaran virus tersebut masih belum siap baik itu dari segi pengetahuan, sumber daya, sarana prasarana dan ekonomi. Hal ini menjadikan pelaksana implementasi merupakan faktor yang sangat riskan yang menjadi garda utama dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Dalam penelitian ini, Dinas Kesehatan Provinsi Bali sangat fokus dalam menaati dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis tentunya wajib melaksanakan kebijakan yang sudah di intruksikan baik itu dari pusat kementrian, maupun daerah Provinsi Bali. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit serta menyesuaikan proses pelaksanaan implementasi penanggulangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan di lapangan. Dalam hal ini seluruh satuan kerja harus memiliki daya tanggap yang kuat dan selalu mengikuti Juknis Covid-19. Seperti contohnya dalam tim surveilans yang bertanggung jawab terhadap tracing ataupun pencatatan dan pelaporan untuk Covid-19 yang tidak boleh salah dalam pelaksanaannya karena ini

terkait informasi database yang harus dituntut akurat. Selain itu Tim Gerak Cepat yang dibentuk merupakan cerminan keseriusan dan kepatuhan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan daya tanggap para pelaksana kebijakan ini dapat dibuktikan dengan cepatnya pembentukan tim, cepatnya menambah literasi bagi pelaksana kegiatan, cepat dalam menentukan proses

pencegahan mulai dari trace, suspek, pengetesan, isolasi dan pengobatan. Cepat dalam berkerja sama dengan lembaga terkait baik itu pihak swasta, Universitas, Komunitas hingga aparat desa adat yang berlandaskan gotong-royong. Dengan demikian kesadaran masyarakat akan informasi yang akurat mengenai Covid-19 dapat dioperoleh dengan baik sehingga proses penanggulangan semakin hari semakin terkoodinir dengan baik.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan paparan data dan informasi yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan penting yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah secara keseluruhan dimensi implementasi kebijakan baik itu menurut Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam menjalankan atau melaksanakan regulasi atau aturan mengenai penanggulangan

dan pencegahan pandemi Covid-19. Dari dimensi lainnya menurut Van meter Van horn yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan serta Kepatuhan serta Daya Tanggap Pelaksana di nilai sudah cukup tepat dan akurat. Hasil penelitian menyatakan bahwa sasaran kebijakan sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh pemerintah serta seluruh elemen lapisan tenaga atau instansi yang bertugas dalam menanggulangi pandemi sudah memiliki kepatuhan dan daya



tanggap yang tinggi terhadap situasi yang bermacam-macam di lapangan. Secara keseluruhan implementasi kebijakan dijalankan cukup baik, hal ini bukan hanya dari pihak internal pemerintah, tetapi juga atas kerja sama dengan lembaga lainnya seperti universitas, organisasi kemasyarakatan, komunitas tertentu dan Lembaga Desa Adat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini. Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah: 1) Perlu adanya peningkatan edukasi terhadap mutasi virus baru terhadap masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dan mengenal gejala-gejala dan risiko yang akan dialami jika terpapar virus baru yang bermutasi; 2) Perlu adanya kajian ulang baik itu secara histori maupun penelitian lebih lanjut tentang penyesuaian penanganan pandemi

Covid-19 secara menyeluruh di wilayah Provinsi Bali. Hal ini berkaitan dengan perbedaan treatment di suatu daerah karena perbedaan demografis serta latar belakang pendidikan agar kedepannya lebih tepat sasaran jika virus Covid-19 kembali menyerang; 3) Perlu adanya pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat tentang indikator penanggulangan menurut WHO, baik itu dalam mencegah penyebaran lagi maupun mengenai vaksinasi Covid-19; dan 4) Perlu adanya tempat-tempat yang menjalankan program pencegahan secara rutin, contohnya *sentinel site* pada Puskesmas atau Rumah Sakit, agar pemerintah dan masyarakat tidak lengah dengan adanya virus-virus lainnya yang bermutasi. Saran dibuat berdasarkan kelemahan, pengalaman, kesulitan, kesalahan, temuan baru yang belum diteliti dan berbagai kemungkinan arah penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Koontz, H., & Wehrich, H. (2010). *Management*. McGraw-Hill.
- Maqbool, A., & Khan, N. Z. (2020). Analyzing barriers for implementation of public health and social measures to prevent the transmission of COVID-19 disease using DEMATEL method. *Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews*, 14(5), 887–892. <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.06.024>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (38th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru., 3 6 (2021).
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Bali., 4 1 (2020).
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Bali, 4 1 (2020).
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 240–249.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sundaram, N., Bonell, C., Ladhani, S., Langan, S. M., Baawuah, F., Okike, I., Ahmad, S., Beckmann, J., Garstang, J., Brent, B. E., Brent, A. J., Amin-Chowdhury, Z., Aiano, F., & Hargreaves, J. (2021). Implementation of preventive measures to prevent COVID-19: A national study of English primary schools in summer 2020. *Health Education Research*, 36(3), 272–285. <https://doi.org/10.1093/her/cyab016>
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 495–508. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

- Wahidah, I., Athallah, R., Hartono, N. F. S., Rafqie, M. C. A., & Septiadi, M. A. (2020). Pandemi COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, *11*(3), 179–188. <https://doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695>
- Xiao, H., Zhang, Y., Kong, D., Li, S., & Yang, N. (2020). The effects of social support on sleep quality of medical staff treating patients with coronavirus disease 2019(COVID-19) in January and February 2020 in China. *Medical Science Monitor*, *26*, 1–8. <https://doi.org/10.12659/MSM.923549>